

1965 dalam Historiografi Film

SIAPA tak kenal dengan film karya Arifin C. Noer yang pada masa Orde Baru selalu diputar setiap malam 1 Oktober? Generasi sampai menjelang tahun 1990-an tentu masih lekat ingatannya pada adegan demi adegan dalam film berdurasi tiga jam lebih itu. Film ini adalah salah satu produk budaya yang menjadi alat politik.

Sebagai "monumen" politik ingatan yang dirilis tahun 1984, film ini menegaskan diri sebagai sebuah dokumen sejarah resmi. Seluruh adegan dalam film ini didasari atas informasi sejarah dalam novel yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Tahun 1998, seiring runtuhnya Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan pemutarannya pada seluruh saluran televisi.

Penghentian pemutaran film ini dapat dibaca sebagai langkah awal upaya dekonstruksi atas interpretasi tunggal sejarah. Saat Orde Baru masih berjaya sebenarnya banyak akademisi yang memberi interpretasi lain atas Peristiwa 1965, namun mereka harus rela dibungkam.

Memasuki masa Reformasi muncul euforia kebebasan. Berbagai elemen kritis dalam masyarakat kembali bermusu budi menegakkan kebenaran ilmiah sejarah dengan menanggalkan selimut kepentingan politik. Film-film baru pun bermunculan menawarkan alternatif lain dalam memandang tragedi berdarah ini.

Film Alternatif

Bertolak belakang dengan sudut pandang film Pengkhianatan G30S/PKI, tahun 2003 muncul *Shadow Play: Indonesia's Year of Living Dangerously*. Film ini melihat narasi besar yang melingkupi Gerakan 30 September yakni situasi Perang Dingin.

Blok Barat yang dipandegani

Amerika Serikat diduga mengetahui secara penuh pembantaian massal di Indonesia pasca Gerakan 30 September. Kisah para penyintas dan keluarga penyintas penangkapan dan pembunuhan dalam kurun waktu 1966 sampai 1970-an ditampilkan dalam film ini. Sisi tragedi kemanusiaan lebih ditonjolkan ketimbang sisi politis.

Lama berselang, tahun 2011, dibuatlah film dokumenter berjudul *Plantungan*. Film ini mengajak para penontonnya untuk menjelajah sejarah ke bekas penjara perempuan yang dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September. *Kamp Plantungan* terletak di perbatasan Kabupaten Batang dan Kendal.

Sekitar 500 tahanan politik perempuan yang mayoritas anggota Gerwani harus bertahan hidup dengan perlakuan tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Film dokumenter lainnya dibuat tahun 2016. Pulau Buru Tanah Air Beta. Film ini menisahkan sejarah kehidupan serba sulit para tahanan politik Pulau Buru, seperti Pramoeodya Ananta Toer, Hersri Setyawan, dan Ted-yabau Sudjojono.

Kisah-kisah tragis korban pembantaian pasca Gerakan 30 September juga difilmkan. Tahun 2012, masyarakat disugahi film *Jembatan Bacem*. Judul film ini diambil dari nama sebuah jembatan di kawasan timur Solo. *Jembatan* ini menjadi saksi bisu kisah tragis pasca Gerakan 30 September yakni pembunuhan dan pembuangan mayat terduga simpatisan komunis di sungai Be-

ngawan Solo.

Film sejenis lainnya yakni *40 Years of Silence: An Indonesia Tragedy*. Film ini mengambil gambar di Jawa dan Bali sebagai wilayah yang paling terdampak atas pembantaian pasca Gerakan 30 September. Film ini beredar di Amerika Serikat dan sangat terbatas penayangannya di Indonesia.

Dalam historiografi film seputar Peristiwa 1965, ada dua film alternatif yang kemunculannya bikin heboh. Pertama, tahun 2012, film *Jagal: The Act of Killing*. Film ini menyuguhkan penuturan sejumlah orang atas pengalamannya kala dipercaya untuk turut menghabisi orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Kedua, tahun 2014, disebut oleh sutradara yang sama, Joshua Oppenheimer, muncul film *Senyap: The Look of Silence*. Film ini

mengambil sudut pandang dari sisi keluarga korban pasca Gerakan 30 September. Film *Jagal* dan *Senyap* berhasil mengebrak massa. Sampai-sampai beberapa acara diskusi dan nonton bareng film ini sempat dilarang.

Sejarah Publik

Apabila film resmi Pengkhianatan G30S/PKI cenderung politis, film-film alternatif ini mengungkap sisi sebaliknya yang tak pernah disentuh dan bersifat kontra narasi. Alhasil keduanya sama-sama tidak bertumpang dan bagaikan dua kutub yang tak pernah bisa bertemu. Padahal sejatinya film sejarah berkemampuan luas untuk mampu membangkitkan kesadaran sejarah publik.

Apalagi kecenderungan sekarang banyak film bertema sejarah yang digarap secara kreatif dan mampu menarik minat masyarakat.

Dalam konteks sejarah publik, film bergenre sejarah memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan sejarah bagi masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa kajian sejarah tidak mula-mula dan semata-mata menjadi sarana edukatif namun juga rekreatif. Untuk itu film sejarah janganlah bertendensi politis maupun free value. Film sejarah sebagai bentuk pendidikan sejarah populer mestinya memberi pencerahan sekaligus internalisasi nilai-nilai hidup bangsa. Film sejarah harus mampu memberi penguatan positif dalam hidup membangun di masa depan.

Tahun-tahun belakangan setiap menjelang tanggal 30 September, pernah beredar imbauan untuk kembali nonton bareng film *Lawas*. Pengkhianatan G30S/PKI. Hal ini tentu menggelitik, film yang sudah lama tidak wajib tayang seolah bangkit dari kuburnya. Pun dari segi estetika, film produksi lama ini sudah tidak bagus lagi kualitas gambar dan suaranya.

Sementara film-film alternatif yang bermunculan juga sering mengundang kontroversi yang tak ada habisnya.

Bercermin dari hal tersebut dan seiring gairah sejarah publik lewat film serta kemajuan teknologi yang pesat, pantaslah apabila dihadirkan sebuah film sejarah yang memaknai Peristiwa 1965 secara lebih segar dan berimbang. Tentunya harus dengan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan jauh dari muatan politis. Generasi mendatang harus jernih melihat sejarah bangsanya. Berdamai dengan masa lalu, menatap masa depan tanpa dendam sejarah. (*)



Hendra Kurniawan, MPd
Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Mahasiswa S3 Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia